



PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

**JIWA NASIONALISME MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN
NEGARA: ANTARA PATRIOTISME DAN PRAGMATISME
SUATU KASUS DI KALIMANTAN**

**BIDANG KEGIATAN:
PKM-GT**

Diusulkan oleh:

Imbalan Zakaria	208211416577/ 2008
Emy Zuroidah	209211423262/ 2009
Bayu Gusti Antri Hariyono	209211423275/ 2009

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
MALANG
2010**

HALAMAN PENGESAHAN USUL PKM-GT

1. Judul Kegiatan : Jiwa Nasionalisme Masyarakat di Wilayah Perbatasan Negara: antara Patriotisme dan Pragmatisme. Suatu Kasus di Kalimantan
2. Bidang Kegiatan : () PKM-AI (√) PKM-GT
3. Ketua Pelaksana Kegiatan
- a. Nama Lengkap : Imbalan Zakaria
- b. NIM : 208211416577
- c. Jurusan : Sastra Indonesia
- d. Universitas/Institut/Politeknik : Universitas Negeri Malang
- e. Alamat Rumah dan No Tel./HP : Jl. Gading pesantren 26 A, Malang
085755019804 Kode pos : 65115
- f. Alamat email : bangjekum@gmail.com
4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : 2 orang
5. Dosen Pendamping
- a. Nama : Drs. M. Misbahul Amri, M.A.
- b. NIP : 19600913 199010 1 001
- c. Alamat Rumah : Jl. Joyopranoto 641 A Malang
kode pos: 65144
- d. No.Telp/HP : 081555620317

Menyetujui,
Ketua Jurusan Sastra Indonesia,

Malang, 23 Februari 2010
Ketua Pelaksana Kegiatan,

Dr. Maryaeni, M.Pd.
NIP.19591010 198601 1 003

Imbalan Zakaria
NIM. 208211416577

Mengetahui,
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
Universitas Negeri Malang,

Dosen Pendamping,

Drs. Kadim Masjkur, M.Pd.
NIP.19541216 198102 1 001

Drs.M.Misbahul Amri, M.A
NIP.19600913 199010 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul “*Jiwa Nasionalisme Masyarakat di Wilayah Perbatasan Negara: antara Patriotisme dan Pragmatisme. Suatu Kasus di Kalimantan*”. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah sumbangsih pemikiran terhadap inovasi pemanfaatan SDA yang ada di Indonesia.

Karya tulis ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Kadim Masjkur, M.Pd. selaku Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan yang telah memberikan kesempatan kepada kami berkreasi.
2. Drs. M. Misbahul Amri, M.A. selaku dosen pendamping dalam pembuatan karya tulis ini.
3. Kedua orang tua penulis tercinta, atas segala doa restu, pengorbanan serta kasih sayangnya yang selalu menyertai langkah penulis.
4. Rekan-rekan yang telah memberikan dorongan dalam pembuatan karya tulis ini.
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih sederhana dan masih banyak kekurangannya. Penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan karya tulis ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Malang, 23 Februari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

1. Bagian Awal

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Ringkasan.....	v

2. Bagian Inti

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.....	1
Tujuan Penulisan	2
Manfaat	2

GAGASAN

Konsep Nasionalisme, Pragmatisme, dan Patriotisme.....	3
<i>Nasionalisme</i>	3
<i>Pragmatisme</i>	6
<i>Patriotisme</i>	7
Faktor Penyebab Terkikisnya Nasionalisme di Perbatasan Negara.....	7
<i>Faktor Alam</i>	7
Jarak.....	7
Tipografi Wilayah.....	7
<i>Faktor Manusia</i>	7
Aspek Ideologi.....	7
Aspek Politik.....	8
Aspek Ekonomi.....	8
Aspek Sosial Budaya.....	9
Aspek Pertahanan dan Keamanan.....	9
Langkah-langkah Strategis Untuk Menjaga Kedaulatan RI di Perbatasan.....	10
<i>Langkah Jangka Pendek</i>	10
<i>Langkah Jangka Menengah</i>	11
<i>Langkah Jangka Panjang</i>	12

KESIMPULAN

Kesimpulan.....	13
-----------------	----

1. Bagian Akhir

Daftar Pustaka.....	vii
Biodata Penulis.....	viii

**JIWA NASIONALISME MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN
NEGARA: ANTARA PATRIOTISME DAN PRAGMATISME
SUATU KASUS DI KALIMANTAN**

Imbalan Zakaria, Emy Zoroidah, Bayu Gusti Antri Hariyono

**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

RINGKASAN

Bangsa terbentuk dari kesepakatan masyarakat yang tinggal di wilayah yang sama. Kesepakatan ini terbentuk dari berbagai aspek yang berkarakteristik sama. Kesepakatan yang telah dibuat akan menciptakan patriotisme dan nasionalisme. Sebuah bangsa dapat bertahan selama kesepakatan tersebut terus dijaga.

Mobilisasi masyarakat saat ini begitu cepat terutama di perbatasan Negara khususnya di Kalimantan, sehingga masyarakat perbatasan di Kalimantan mengalami gradasi nasionalisme akibat ketergantungan terhadap bangsa lain. Mobilisasi masyarakat dunia dalam memenuhi kebutuhan sumber daya alam memaksa berbagai bangsa di dunia melakukan transaksi. Di dalam transaksi tersebut sering terjadi pertukaran yang dilandasi berbagai kepentingan. Aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, terpaksa dilebur demi konvensi perdagangan yang dilakukan. Peleburan paham ini mengakibatkan benturan-benturan paham. Paham yang dianggap merugikan individu seperti patriotisme dan nasionalisme sering ditinggalkan demi mengejar keuntungan. Akibatnya gejala disintegrasi bangsa mulai bermunculan. Disintegrasi sebuah bangsa tidak lepas dari perubahan sistem masyarakat dari nasionalisme ke arah pragmatisme.

Perubahan paham ini dapat diatasi selama masyarakat yang tinggal di dalam bangsa itu masih menjaga nilai-nilai kesepakatan yang telah dibuat bersama. Selain masyarakat, pemerintah juga mempunyai andil di dalam menjaga kestabilan daerah perbatasan. Salah satu caranya adalah membuat kebijakan yang berbasis budaya lokal, sehingga masyarakat perbatasan mendapatkan pengayoman hukum yang adil. Kesepakatan yang telah lama dianut, tentu tidak semudah itu untuk dirubah, ini adalah sisi positif untuk ketahanan nasional. Akan tetapi apabila secara terus-menerus mendapat gesekan akibat hukum konvensi internasional tanpa didampingi dengan penguatan kesepakatan yang telah disetujui, maka disintegrasi bangsa tidak dapat dihindari.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi perkembangan pragmatisme di masyarakat perbatasan dilakukan secara sistematis dan bertahap. Perlu diadakan pertemuan antar stake holder untuk membahas perubahan sosial yang terjadi selama ini, karena bangsa Indonesia terbangun dari berbagai latar belakang yang berbeda. Secara spesifik langkah ini bertujuan untuk mempertegas kedaulatan bangsa Indonesia.

Implementasi dari penguatan kedaulatan bangsa Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kokoh di mata dunia. Sehubungan dengan politik bebas aktif yang terkandung dalam dasar Negara, bangsa Indonesia lebih berperan aktif di dunia dan di dalam negerinya.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Enam puluh empat tahun Indonesia merdeka, namun masa kemerdekaan itu belum bisa memberikan kontribusi terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. Kedaulatan bangsa Indonesia berdasarkan hukum Internasional diakui oleh bangsa lain semenjak proklamasi kemerdekaan. Pada tahun 60-an Irian Barat bergabung dengan Republik Indonesia (RI) disusul oleh Timor-timur pada tahun 70-an. Sejak Portugis menjajah Indonesia, rakyat Aceh ingin memerdekakan diri, namun setelah pemerintah menetapkan Aceh sebagai daerah istimewa, pemberontakan ini dapat diredam. Republik Maluku Selatan (RMS) diduga oleh ahli sejarah sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda, diduga sampai sekarang tokoh pendiri RMS masih tinggal di Belanda. Pemberontakan RMS ini pada akhirnya dapat diredam oleh pemerintahan orde lama (ORLA).

Upaya pemerintahan ORLA dalam mempertahankan kedaulatan RI dapat dikatakan sukses. Isu revolusi dan pembangunan dapat menghagemoni rakyat Indonesia selama hampir lima dekade. Namun, krisis global pada tahun 90-an telah menyadarkan rakyat Indonesia dari keadaan yang diidealkan. Banyak aspek yang diduga menjadi kelalaian pemerintah pada masa lima dekade itu. Kelalaian ini semakin lama semakin bertambah, klimaksnya adalah pada era 90-an yang waktu itu terjadi krisis ekonomi global. Masyarakat mulai sadar bahwa selama masa ORLA telah ditindas.

Gejala disintegrasi bangsa Indonesia tidak berhenti di sini saja. Pada tahun 1998 Timor-timur lepas dari NKRI dan pada tahun 2002 Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda memutuskan pulau Ligitan dan Sipadan menjadi sah milik Malaysia, padahal secara de facto pulau tersebut adalah wilayah Indonesia, karena paparan benua pada pulau tersebut masih menyatu pada Indonesia.

Stabilitas di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia juga mengkhawatirkan, satu contohnya adalah terdapat isu bahwa beberapa Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi anggota Askar Wataniyah (paramiliter Malaysia). Kehadiran Askar Wataniyah yang dipersenjatai oleh Malaysia sangat meresahkan masyarakat, teror dan intimidasi kepada rakyat Indonesia yang ada di perbatasan berkembang setelah tentara ini dibentuk.

Permasalahan yang terurai di atas tidak terlepas dari keadaan politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan yang kontras di perbatasan, selain itu pelayanan publik, yang dirasa kurang pada masyarakat di wilayah perbatasan Negara merupakan satu hal yang menyebabkan terkikisnya nasionalisme. Kegiatan sehari-hari masyarakat seperti belanja, menjual hasil kebun, bersekolah, dan layanan kesehatan dilakukan di Negara tetangga. Masyarakat perbatasan Negara lebih menggantungkan hidupnya pada Negara tetangga karena fasilitas yang diberikan Pemerintah Indonesia di wilayah perbatasan sangat minim. Pemerintah kurang memfasilitasi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Negara, sehingga masyarakat pun menjadi kurang peduli terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak mustahil lama-kelamaan masyarakat di wilayah perbatasan merubah status kewarganegaraannya karena ketergantungannya itu.

Latar belakang budaya yang tidak sama di wilayah perbatasan, juga merupakan satu hal yang dapat mengancam kedaulatan negara dan ketahanan

nasional. Maka dari itu peran dari pemerintah untuk menyatukan visi dan misi masyarakat wilayah perbatasan sangat diharapkan agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Pemerintah diharapkan bisa memupuk jiwa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan, karena mereka merupakan garis terdepan NKRI.

Permasalahan yang sering muncul di wilayah perbatasan Negara adalah masalah keamanan, kesejahteraan masyarakat yang kurang diperhatikan, serta *patok* perbatasan yang selalu bergeser.

Pada situs resmi provinsi Kalimantan timur, di pulau Kalimantan terdapat wilayah perbatasan yang masih setia pada NKRI, wilayah itu adalah Apokayan Kaltim. Daerah Apokayan ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Pada situs resmi provinsi kaltim itu ditulis kecintaan warga Apokayan pada NKRI tidak diragukan karena sejak masa kemerdekaan warga setempat juga ikut menumpang penjajahan Jepang yang menduduki wilayah itu, bahkan pada masa perjuangan Dwikora (Dwi Komando Rakyat) daerah tersebut menjadi markas terdepan pasukan TNI untuk melawan musuh yang pada saat itu dikenal dengan sebutan “Ganyang Malaysia”.

Dari paparan di atas maka dianggap perlu untuk segera mengambil langkah untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Salah satu cara yang paling mendasar adalah meningkatkan nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia pada umumnya dan khususnya masyarakat perbatasan Negara.

Tujuan

1. Mendeskripsikan konsep nasionalisme, patriotisme, dan pragmatisme.
2. Mendeskripsikan hal-hal yang menyebabkan terkikisnya jiwa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan Negara Indonesia, khususnya di Kalimantan.
3. Menjelaskan langkah-langkah untuk menjaga kedaulatan RI di perbatasan Negara.

Manfaat

Bagi Pemerintah

- a. Sebagai acuan pemerintah untuk perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
- b. Memberikan kontribusi tentang pentingnya wilayah perbatasan sebagai garis terdepan keutuhan NKRI.
- c. Sebagai koreksi terhadap kinerja pemerintahan.

Bagi Lembaga Pendidikan

- a. Menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan kurikulum di sekolah terutama untuk penanaman rasa cinta tanah air.

Bagi Masyarakat Pada Umumnya

- a. Sebagai salah satu media untuk menjaga dan meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsanya sendiri.
- b. Merupakan tambahan ilmu geopolitik dan ilmu hukum “kewarganegaraan”.

GAGASAN Konsep Nasionalisme, Pragmatisme, dan Patriotisme

Nasionalisme

Nasionalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu *nation* (bangsa/sekelompok masyarakat) dan *isme* (paham). Dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata nasionalis berarti kebangsaan. “Rochmadi (1993) menjelaskan, nasionalisme adalah suatu gejala psikologis berupa rasa persamaan dari sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran untuk diakui keberadaan dirinya sebagai suatu bangsa karena adanya keadaan yang sama serta mempunyai tujuan yang sama pula di masa depan dan merupakan hasil dari faktor politik, sosial, dan intelektual”.

Namun, dugaan awal ini benar-benar berlaku pada kondisi bangsa yang memiliki kestabilan budaya dan ekonomi.

Kearifan lokal sebagai acuan budaya masyarakat lokal telah dijalani bertahun-tahun. Warisan budaya lokal ini telah diturunkan ke generasi berikutnya. Aturan adat lokal telah dipercaya dan menjadi sumber kehidupan masyarakatnya.

Namun, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang dan peraturan daerah yang telah dibuat adakalanya kurang menampung aspirasi dari kondisi masyarakat daerah. Sehingga kebijakan yang diterapkan melanggar aturan setempat.

Contoh pelanggaran dalam kasus ini adalah kasus kepemilikan tanah di Kalimantan. Secara turun-temurun, ada aturan adat yang mengatur pengelolaan tanah. Kepemilikan tanah pada masyarakat adat hanya sebatas pengakuan bersama masyarakat lokal dan tidak ada surat hak milik yang memperkuat kepemilikannya. Jadi ketika pemerintah menetapkan suatu daerah menjadi kakuasaan HPH (Hak Pengelolaan Hutan) maka masyarakat lokal yang tidak mempunyai sertifikat tanah terpaksa merelakan tanahnya atau mengungsi.

Kasus pelanggaran hak masyarakat lokal oleh pemerintah berikutnya adalah hak eksplorasi sumber daya alam. Budaya *ladang berpindah* masyarakat Indonesia di daerah pelosok diputuskan pemerintah sebagai tindakan perusakan alam. Kalau dikaji secara detail budaya ladang berpindah adalah budaya terstruktur dari suku-suku lokal.

Suku-suku yang ada di Pulau Kalimantan yang berprofesi menggunakan teknik *ladang berpindah* sangat banyak. Karena banyaknya suku itu, maka telah dibuatlah kesepakatan suku-suku itu mengenai hukum pengelolaan ladang. Jadi, ladang yang dikelola oleh masyarakat ini siklusnya tetap. Sehingga tidak terjadi benturan dengan suku-suku lain. Di dalam perpindahan ladang yang dikelola terdapat jeda waktu yang cukup bagi pohon untuk tumbuh dan layak ditebang. Luas area ladang yang dikelola diberi batas. Maka kesimpulan yang dapat ditarik dari budaya *ladang berpindah* bahwa aturan ini tidak merusak lingkungan

Dampak yang terjadi akibat keputusan pemerintah yang tidak mempertimbangkan unsur-unsur budaya lokal adalah terjadinya ketidakseimbangan kondisi sosial di masyarakat. Masyarakat terpecah menjadi dua kelompok besar yakni masyarakat yang pro pemerintah dan yang menjadi korban, dan ancaman disintegrasi bangsa telah muncul.

Pemerintah di dalam merumuskan undang-undang seharusnya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap kepentingan masyarakat lokal yang menjadi objek kebijakannya. Sehingga dasar penetapan keputusan pemerintah yang berbasis kepentingan rakyat, dapat diterima semua pihak.

Unsur kedua yang perlu dipertimbangkan untuk menjaga nasionalisme adalah unsur ekonomi. Alasannya ekonomi adalah pendukung terkuat stabilitas negara. Dengan ekonomi yang kuat, maka negara mampu menyediakan semua kebutuhan penduduknya.

Penduduk yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan segala cara. Contoh dalam kasus ini adalah Askar Wataniyah yang terdapat di Pulau Kalimantan, tepatnya di daerah perbatasan dengan Malaysia. "Daerah perbatasan negara di Kalimantan khususnya yang wilayah Indonesia, tidak menyediakan akses pemenuhan kebutuhan, Green (2009)". Faktor pendidikan dan lapangan kerja tidak mengakomodasi penduduk Kalimantan perbatasan Negara. Sehingga, masyarakat menyeberang ke negara tetangga. Dari paparan ini terdapat masalah, apakah Askar Wataniyah ini masih memiliki Nasionalisme? Apakah nasionalisme mereka kepada bangsa Indonesia kembali kuat, apabila kebutuhannya dipenuhi oleh bangsa Indonesia?

Untuk menjawabnya kita perlu menggali sumber masalah sebelumnya, alasan mengapa rakyat RI mau bergabung dengan Askar Wataniyah. Alasan mengapa mereka bergabung adalah karena faktor ekonomi. Sebagian besar anggota Askar Wataniyah adalah dari masyarakat pendatang dari luar Kalimantan (eks. transmigran). Masyarakat ini tidak memiliki lapangan kerja untuk mencukupi kebutuhannya karena pascaberhenti dari pekerjaan sebagai buruh penebang kayu ilegal. Askar Wataniyah bukanlah dari suku asli Kalimantan. Suku asli Kalimantan pada saat ini sudah diberi jatah yang memadai di bidang pekerjaan, khususnya bidang pemerintahan dan sektor lainnya. Lapangan kerja lokal yang muncul dari kebijakan otonomi daerah ini memberi kontribusi yang cukup besar bagi keberlangsungan masyarakat asli.

Apabila sumber permasalahan dari terbentuknya Askar Wataniyah adalah ekonomi, maka hal ini dapat segera diatasi. Bergabungnya masyarakat RI dengan Askar Wataniyah hanya terbentuk dari unsur pragmatis saja. Mereka hanya mengambil untungnya saja dari kejadian ini. Jadi, pada dasarnya mereka masih memiliki nasionalisme. Apabila kebutuhannya dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, tanpa diminta pun mereka akan kembali dan membela NKRI.

Kasus disintegrasi bangsa oleh faktor ekonomi tidak terjadi di Indonesia saja. Di negara-negara lain yang terkena resesi akibat perang dingin ataupun perang dunia mengalami disintegrasi. Rusia adalah salah satu contohnya. Rusia yang terbentuk dari berbagai kriteria seperti disebutkan Rochmadi telah runtuh dan terpecah belah menjadi beberapa bagian Negara kecil. Ukraina sebagai pendukung utama Negara Rusia telah memerdekakan diri.

Sektor lain yang perlu dimasukkan di dalam unsur pembentuk nasionalisme adalah kekuatan pertahanan dan keamanan (Hankam) negara. Negara yang memiliki kekuatan pertahanan dan keamanan yang besar mampu mempertahankan negaranya dari negara lain. Contoh negara yang tidak mampu menjaga kestabilan Hankam negaranya adalah Irak. Kekuatan Hankam Irak saat ini sangat lemah. Dulu, kekuatan Hankam Irak sangat kuat, namun setelah kekalahan menginvasi Kuwait pada tahun 1990 embargo senjata dan suku cadang

senjata telah memberikan arti yang cukup signifikan pada saat ini. Irak tidak mampu mempertahankan Baghdad dari bombardir peluru kendali Amerika. Amerika dengan leluasa mengintervensi pemerintahan Irak. Segala aset penting telah dikontrol dan dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Masyarakat Irak tidak leluasa lagi mengakses pelayanan pemerintah seperti masa sebelumnya. Ketidakleluasaan ini menimbulkan ketimpangan di dalam sosial Irak. Kondisi ketimpangan ini mengakibatkan berkembangnya protes, demonstrasi dan teror yang mengancam disintegrasi bangsa.

Ketiga butir diatas yakni kebudayaan, ekonomi dan Hankam adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam membentuk nasionalisme. Berbeda pendapat dengan Rochmadi (1993) yang hanya menyebutkan enam faktor yakni perasaan nasional, watak nasional, batas nasional, bahasa nasional, agama, dan peralatan nasional.

Perasaan nasional dianggap sebagai pengikat suatu bangsa untuk bersatu, baik ke dalam maupun ke luar. Namun, apabila ditelaah dengan kondisi saat ini pendapat ini sudah tidak relevan. Perasaan nasional sudah tidak mengikat lagi. Karena sejatinya perasaan nasional terbentuk dari kumpulan perasaan daerah yang sama. Untuk menyatukan perasaan daerah sangatlah susah, karena setiap daerah itu memiliki keberagaman yang sulit untuk disatukan. Aspek yang susah disatukan adalah akibat dari keberagaman sejarah, budaya dan keadaan alam yang berbeda. Akibatnya membentuk perasaan yang berbeda pula. Contohnya perasaan warga di daerah perbatasan dengan Malaysia cenderung ingin memerdekakan diri daripada bergabung dengan NKRI, karena ada unsur iri dengan negara yang memiliki kesamaan perasaan daerah seperti di Brunei dan Malaysia, akan tetapi dua negara tersebut jauh lebih makmur daripada daerahnya. Perasaan iri ini menyebabkan lahirnya bibit-bibit separatis seperti GAM di Aceh dan Askar Watanyah di Kalimantan.

Jadi kesimpulannya perasaan nasional sebagai pengikat suatu bangsa sebaiknya diganti dengan perasaan kedaerahan yang sama.

Hal berikutnya, beberapa anggapan yang perlu dirubah dari pendapatnya Rochmadi adalah anggapan watak nasional sebagai unsur pembentuk nasionalisme. Watak nasional dianggap sebagai pencerminan watak bangsa secara keseluruhan. Anggapan ini kurang ideal dengan kondisi saat ini. Bagaimana bisa watak daerah yang berbeda-beda dijadikan satu apabila watak dasar masyarakat itu sudah berbeda. Seperti kasus perang suku di Sampit antara suku Dayak dan Madura. Suku Dayak yang tinggal di Sampit tidak dapat menerima watak suku Madura. Suku Madura dianggap berwatak buruk dan kasar oleh suku Dayak karena beberapa kasus kriminal yang dilakukan oleh orang Madura. Sebaliknya, suku Dayak adalah suku yang dianggap bodoh oleh suku Madura, sehingga suku Madura berbuat seenaknya sendiri tanpa kontrol dari masyarakat adat di Sampit. Dari perbedaan watak ini, menimbulkan suatu konflik yang terpendam selama bertahun-tahun. Dan puncaknya pada Februari 2001 meletuslah perang suku yang paling berdarah dalam sejarah Indonesia.

Jadi pendapat yang paling tepat untuk merevisi watak nasional sebagai unsur pembentuk nasionalisme dengan mengganti watak nasional dengan watak daerah.

Batas nasional dianggap pula sebagai unsur pembentuk nasionalisme. Rochmadi menerangkan bahwa batas nasional adalah batas territorial yang

didiami suatu bangsa. Bagaimana bisa pemerintah nasional mengawasi daerah-daerah padahal wilayah Indonesia sangat luas. Seharusnya pengawasan itu harus diserahkan pada daerah itu sendiri sebagai daerah yang berkepentingan langsung dengan wilayahnya. Masyarakat daerah di wilayah perbatasan itu secara otomatis merasa memiliki daerahnya tanpa diminta mereka bersedia menjaga wilayahnya. Kasus lepasnya pulau Ligitan dan Sipadan membuktikan bahwa di daerah kedua pulau tersebut tidak diawasi dan dijaga. Sehingga pemerintah tidak tahu perkembangan di pulau itu. Masyarakat daerah yang tinggal di pulau Ligitan dan Sipadan pun tidak dilibatkan. Masyarakat tersebut menganggap bahwa pulau tersebut sudah diawasi oleh angkatan laut. Sedangkan angkatan laut menganggap masyarakat daerah tersebut sudah mengawasinya. Pada akhirnya Malaysia yang mengambil keuntungan dari kasus ini. Malaysia membangun infrastruktur yang berciri kemalaysiaan. Ciri ini bisa dilihat dari arsitektur bangunan wisata yang terdapat di pulau itu. Jadi akibatnya Indonesia tidak bisa menunjukkan bukti bahwa pulau itu adalah miliknya.

Kesimpulannya bahwa batas nasional tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai unsur pembentuk nasionalisme. Redaksi batas nasional lebih baik diganti dengan batas daerah.

Konsep nasionalisme yang telah terurai dalam penjelasan sebelumnya terkait dalam beberapa konsep yang lain, diantaranya pragmatisme dan patriotisme.

Pragmatisme

“Suriasumantri (2007), bagi seorang pragmatis suatu pernyataan adalah benar, jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia”

Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pragma* yang berarti guna, tindakan, atau perbuatan. Satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya. Jadi, pengertian atau keputusan itu benar, jika pada praktek dapat dipergunakan.

“Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu, asal saja membawa akibat praktis. Pengalaman-pengalaman pribadi, kebenaran mistis semua bisa diterima sebagai kebenaran dan dasar tindakan asalkan membawa akibat yang praktis yang bermanfaat. Dengan demikian, patokan pragmatisme adalah ‘manfaat bagi hidup praktis’ (Praja, 2005: 171).”

Pragmatisme apabila dikaitkan dengan nasionalis adalah suatu hal yang berlawanan. Nasionalisme mewajibkan seluruh pembentuk bangsa untuk bersatu di bawah satu naungan yaitu negara, dimana hak-hak individu yang tinggal di negara itu dibatasi untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Sedangkan pragmatisme mempunyai tipikal yang sama dengan sifat manusia yaitu menginginkan sesuatu yang praktis dan berguna bagi dirinya. Tentunya dua paham ini tidak akan pernah bisa menyatu di satu negara, karena hidupnya salah satu paham ini mengancam keberlangsungan paham yang lain.

Patriotisme

Dalam kamus bahasa Indonesia *patriot* (pembela bangsa dan negara; cinta tanah air), sedangkan *isme* (paham; aliran). Jadi patriotisme merupakan aliran yang cinta tanah air serta siap membela bangsa dan negaranya. Patriotisme merupakan paham yang perlu ditanamkan sejak dini kepada para generasi muda.

Patriotisme apabila dihubungkan dengan nasionalisme mempunyai tipikal yang sama, namun ada perbedaan yang tipis. Patriotisme dan nasionalisme memiliki kepentingan yang sama untuk membela keberadaan bangsanya. Perbedaannya, pada saat ini patriotisme itu lebih condong kepada pengorbanan jiwa raganya kepada bangsanya tanpa memandang status sosial sedangkan nasionalisme memberikan kelonggaran masyarakatnya untuk membela negara sesuai dengan kemampuannya.

Faktor Penyebab Terkikisnya Nasionalisme di Perbatasan Negara

Faktor Alam

Jarak

Jarak yang jauh dari akses pemerintah Indonesia menyebabkan lambatnya respon dari pemerintah Indonesia mengenai permasalahan daerah perbatasan. Sehingga masyarakat mencari jalan pintas ke negara tetangga untuk memenuhi kebutuhannya.

Tipografi Wilayah

Kondisi alam yang tidak merata di berbagai daerah Negara menjadi penghalang pemerintah untuk membangun dan mengawasi daerah di perbatasan. Semakin beragam tipografinya, maka membutuhkan infrastruktur transportasi yang banyak.

Faktor Manusia

“Mahendra Putra Kurnia (2008) menerangkan tentang kondisi umum daerah perbatasan dapat dilihat dari aspek pancagatra, yaitu aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek Sosbud dan aspek Hankam.”

Aspek Ideologi

Mahendra menganggap kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan perbatasan Negara dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia. Sehingga menyebabkan penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai Ideologi

Negara dan falsafah hidup bangsa tidak disosialisasikan dengan gencar seperti dulu lagi, karena tidak seiramnya antara kata dan perbuatan dari penyelenggara Negara.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sangat sesuai dengan keadaan masyarakat di Kalimantan. Masyarakat Kalimantan apabila diurut dari struktur genetisnya berasal dari keturunan ras Melanesia. Ras Melanesia yang ada di Kalimantan berasimilasi dengan kebudayaan yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini masih dianut sampai sekarang, agama keharingan adalah salah satu buktinya.

Peristiwa perang suku di Sampit pada tahun 2001 adalah suatu efek dari penodaan kepercayaan suku Dayak oleh suku Madura. Masyarakat Madura banyak melakukan perusakan pada situs-situs yang dikeramatkan masyarakat Dayak. Masyarakat Madura dengan mudahnya menebangi pohon-pohon besar yang dikeramatkan tanpa menyadari konsekuensi yang akan ditanggung kelak.

Bersatunya masyarakat suku Dayak di dalam memerangi suku Madura adalah salah satu bukti bahwa ideologi masyarakat lokal masih memiliki andil di dalam membentuk persatuan. Masyarakat suku Dayak sudah tidak berpikir pragmatis lagi. Penodaan ideologi atas kepercayaan lokal dianggap sebagai kejahatan terbesar.

Aspek Politik

Kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan umumnya di pengaruhi oleh kegiatan di Negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik, terutama apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada perekonomian Negara tetangga. Hal ini dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik, situasi politik yang terjadi di Negara tetangga seperti Malaysia (Serawak dan Sabah) dan Filipina Selatan akan turut memengaruhi situasi keamanan daerah perbatasan.

Lepasnya pulau Ligitan dan Sipadan dari NKRI tidak lepas dari pengaruh politik Negara tetangga, begitu pula dengan kasus Askar Wataniyah. Masyarakat daerah perbatasan sangat mudah terpengaruh dengan politik Negara tetangga. Masyarakat tidak akan pernah tahu bahwa campur tangan Negara tetangga pasti mempunyai maksud tertentu. Seandainya masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang cukup maka masyarakat tidak akan mudah tergiur dengan ajakan illegal dari Negara lain.

Aspek Ekonomi

Pada pembahasan sebelumnya mengenai unsur pembentuk nasionalisme faktor ekonomi adalah faktor kedua yang perlu dipertimbangkan untuk segera dilakukan pembenahan. Karena masalah ekonomi adalah masalah yang paling mendesak setelah faktor budaya.

“Menurut Mahendra (2008) hal yang menyebabkan daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal (terbelakang) antara lain:

- a) Lokasinya yang relatif terisolasi (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.
- b) Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- c) Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).
- d) Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (blank spot).”

Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat Negara tetangga memengaruhi watak pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme.

Walaupun masyarakat Kalimantan di perbatasan di dalam proses bergabung dengan Askar Wataniyah didorong oleh faktor ekonomi, maka penggabungan ini dapat dibubarkan apabila kebutuhan ekonominya dapat dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Dari perkara ini dapat ditarik kesimpulan Askar Wataniyah masih memiliki nasionalisme.

Pemerintah tidak boleh menganggap remeh eksistensi Askar Wataniyah. Walaupun pada pembentukan awal dari Askar Wataniyah masyarakat Kalimantan menganut paham pragmatisme (mengambil keuntungan dari Malaysia), pada anak cucunya kelak nilai nasionalisme akan hilang. Apabila hal ini sampai terjadi, hal terburuk kita akan kehilangan pulau Kalimantan di masa yang akan datang.

Aspek sosial budaya

Nilai-nilai lokal dari kebudayaan lokal harus di aplikasikan ke daerah lokal tersebut. Pengaplikasian kebudayaan ini akan memupuk nasionalisme masyarakat lokal. Dengan disahkannya kepemilikan daerah lokal di perbatasan kepada masyarakat aslinya akan membawa dampak penguatan pengawasan di daerah perbatasan oleh masyarakat daerah setempat.

Akibat globalisasi dan perkembangan iptek, dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke Indonesia. Budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dapat merusak ketahanan nasional. Masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing, dikarenakan intensitas hubungan lebih besar dan kehidupan ekonominya sangat tergantung dengan Negara tetangga.

Aspek pertahanan dan keamanan

Daerah perbatasan merupakan wilayah penggunaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan territorial sulit dilaksanakan dengan mantab dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktivitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, ditingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Daerah perbatasan rawan akan penyelundupan dan kriminal termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama terpadu antara instansi terkait dalam penanganannya.

Langkah-Langkah Strategis untuk Menjaga Kedaulatan Republik Indonesia di Perbatasan Negara

Langkah Jangka Pendek

Pemerintah membuat kesepakatan perbatasan Negara dengan Negara tetangga, tidak menggunakan metode lama (patok) akan tetapi dikombinasikan dengan GPS (Global Positioning System), sehingga batas negara tidak bergeser lagi.

Selama ini sering diberitakan kasus pergeseran patok perbatasan Negara di Kalimantan. Penandaan daerah perbatasan di daratan yang berdasarkan patok masih kurang efektif, karena dasar dari penandaan patok itu adalah unsur alam (jarak dari sungai, laut, dan pulau) yang dapat berubah. Sungai bisa melebar karena faktor erosi, pulau juga bisa mengalami abrasi. Jadi kesimpulannya penggunaan patok sebagai batas Negara masih lemah.

Berbeda dengan GPS, posisi yang ditentukan sistem ini ditentukan oleh pertemuan garis lintang dan garis bujur mengikuti lengkung bumi. Akurasi dari sistem ini sangat kuat untuk dijadikan dasar batas Negara, karena garis yang ditentukan oleh sistem ini tidak bisa bergeser, walaupun terjadi perubahan struktur permukaan bumi. Namun kelemahan dari sistem ini tidak dapat dilihat secara fisik tanpa bantuan alat pencari GPS.

Untuk memperbaiki kedua kelemahan sistem di atas maka perlu dikombinasikan. Secara hukum, wilayah batas Negara diakui berdasar GPS dan dikuatkan oleh patok.

Mengamandemen undang-undang yang mengakomodir kepentingan lokal di daerah perbatasan.

Masyarakat di wilayah perbatasan penjaga pertama kedaulatan wilayah RI. Maka dari itu, perlu adanya undang-undang yang mengatur sistem digaris perbatasan ini secara khusus.

Untuk menetapkan amandemen UU, harus diadakan mediasi dengan masyarakat lokal.

Mengesahkan aturan lokal untuk dijadikan acuan masyarakat lokal.

Pemerintah harus mempertimbangkan kondisi kedaerahan wilayah perbatasan sebelum membuat keputusan. Aturan lokal perlu disahkan untuk meredam polemik yang berkembang akibat masyarakat pendatang.

Melakukan mediasi dengan masyarakat lokal untuk dijadikan bahan evaluasi kinerja pemerintah.

Secara berkala pemerintah harus membuat sistem pengawasan mediasi terhadap masyarakat perbatasan mengenai isu-isu yang berkembang. Dari mediasi itu pemerintah diharapkan mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga pemerintah dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah tersebut secara bersama-sama.

Langkah Jangka Menengah

Menjalinkan kerjasama antar stake holder di antaranya pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menjaga kedaulatan RI di wilayah perbatasan.

Perlu dibuat sistem yang mengakomodir pihak-pihak yang terkait dengan wilayah perbatasan. Pihak-pihak itu adalah Pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Tugas pemerintah adalah sebagai pelaksana konstitusi di dalam menciptakan keadaan di perbatasan yang kondusif. Sedangkan tugas masyarakat di wilayah perbatasan adalah menjaga wilayah ini tetap produktif dan potensial, dan tugas LSM adalah sebagai pihak evaluator terhadap keadaan di garis perbatasan. Tugas pemerintah di dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan dibantu oleh TNI dan petugas yang terkait. Sedangkan tugas masyarakat dibantu oleh sarana dan prasarana yang menunjang produktivitas daerah perbatasan. LSM dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh kalangan akademis. Ketiga unsur ini membentuk satu kesatuan. Tujuan kesatuan yang telah dibentuk ini adalah memantapkan kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Kerjasama antara ketiga *stake holder* ini saling melengkapi. Pemerintah yang membangun, rakyat yang menjalankan, dan LSM yang mengawasi. Ketiga proses ini harus saling membantu dan melengkapi, agar kedaulatan wilayah dapat dipertahankan.

Pemerintah harus mengembangkan penelitian untuk dikembangkan melalui usaha strategis yang dapat diinvestasikan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, perlu pengoptimalan eksplorasi sumber daya. Untuk menemukan sumber daya ini diperlukan penelitian ke daerah-daerah yang dianggap potensial menghasilkan. Hasil dari penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis. Salah satu langkah strategisnya adalah membangun infrastruktur eksplorasi sumber daya. Pembangunan ini memerlukan dana yang besar, maka dari itu lebih bijak apabila dibuka investasi untuk mewujudkannya.

Investasi ini melibatkan masyarakat lokal sebagai perencana, pelaku, dan pengawas program, agar hasil investasi ini dapat memberikan kesejahteraan masyarakat perbatasan Negara.

Setelah usaha strategis di wilayah perbatasan terbentuk, perusahaan diwajibkan untuk mengoptimalkan program CSR (*Corporated Social Responcibility*). Program CSR yang digulirkan harus mendukung program ketahanan ekonomi masyarakat perbatasan.

Langkah Jangka Panjang

Pemerintah memprioritaskan pembangunan dan pengawasan di daerah perbatasan, sehingga stabilisasi ekonomi dan ideologi masyarakat di wilayah perbatasan tetap terjaga.

Pembangunan yang paling vital adalah pembangunan pangkalan militer. Pangkalan militer diharapkan menjaga daerah perbatasan dari para penyusup. Pangkalan militer yang dibangun hendaknya mempunyai beberapa kriteria pendukung seperti pemancar radio, pusat pendidikan dan pelatihan, serta koperasi.

Dengan pemancar radio, pemerintah dapat mengarahkan rakyat yang tinggal di perbatasan dengan informasi-informasi yang mendidik. Tujuan dari siaran ini untuk meningkatkan nasionalisme, menyiarkan berita-berita terbaru, dan menangkal isu-isu dari negara asing.

Berikutnya tujuan dibangun pusat pendidikan dan pelatihan adalah untuk memberikan layanan pendidikan formal maupun informal khususnya aspek politik, sosbud dan HAM. Diharapkan hasil pelatihan ini membuat rakyat perbatasan sadar politik dan hukum, dengan begitu tidak akan mudah terpengaruh oleh negara lain.

Pembangunan berikutnya adalah pembangunan koperasi. Koperasi dibangun bertujuan untuk memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada masyarakat perbatasan. Koperasi harus memberi kemudahan pemenuhan kebutuhan masyarakat perbatasan. Setelah koperasi terbangun diharapkan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan tidak berbelanja ke negara lain.

Menambah pendidikan politik, hukum dan HAM kepada masyarakat perbatasan melalui kegiatan formal dan informal.

Pendidikan sektor-sektor ini dapat disebarakan melalui TV, radio dan pangkalan militer di perbatasan. Pangkalan militer dapat dikembangkan fungsinya. Tidak hanya sebagai tempat tinggal TNI, pangkalan militer juga dapat digunakan sebagai sarana pendidikan di luar sekolah bagi generasi penerus bangsa.

Menambah jam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mulai tingkat dasar (SD) hingga pendidikan tinggi untuk menambah pengetahuan dan penanaman nasionalisme dan patriotisme.

Pendidikan formal dalam kaitannya dengan pelajaran nasionalisme dapat diajarkan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,

kemudian pengaplikasiannya dinilai dalam kegiatan sehari-hari seperti upacara bendera, sikap, dan perasaan kepada bangsa Indonesia. Maka dari itu, perlulah untuk menambah jam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah.

KESIMPULAN

Adanya suatu bangsa dikarenakan kesepakatan sekelompok masyarakat yang memiliki persamaan ideologi, budaya, sejarah untuk membentuk suatu tujuan bersama di bawah satu aturan yang disepakati.

Nasionalisme terbentuk dari bermacam-macam aspek. Aspek yang paling vital adalah aspek budaya, ekonomi, dan hankam. Pemerintah harus dapat mengimplementasiakn ketiga aspek itu sebagai pembentuk nasionalisme.

Masyarakat yang mendiami suatu negara, berkembang menjadi masyarakat yang dinamis sesuai dengan keadaan lingkungannya. Perkembangan masyarakat negara di wilayah perbatasan tidak sama dengan perkembangan masyarakat di perkotaan.

Konsep suatu bangsa saat ini sangat bergantung pada kondisi masyarakat yang tinggal didalamnya, sedangkan keadaan masyarakat itu selalu berubah dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Pada zaman sekarang, pergerakan antarbangsa begitu cepatnya, terutama masyarakat di perbatasan, sehingga pertukaran kebudayaan, ideologi, dan ekonomi sangat mungkin terjadi. Apabila perubahan kondisi sosial masyarakat ini terjadi akan berdampak pada pola pikir masyarakat dari nasionalisme ke arah pragmatisme. Apabila pola pikir pragmatisme tetap dibiarkan akan membuat disintegrasi pada bangsa.

Untuk mencegah disintegrasi bangsa ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah ini disusun terkombinasi untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Republik Indonesia.

Untuk mempertahankan wilayah Republik Indonesia dilakukan secara bertahap, mengingat wilayah Indonesia sebagian besar lautan dan Indonesia masih belum terlepas dari krisis ekonomi. Langkah penegasan yang dilakukan akan berdampak pada pemerataan pembangunan dan srtabilisasi kedaulatan Negara di wilayah perbatasan, sehingga tidak terulang lagi peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan.

Daftar Pustaka

- (1) Kurnia, Mahendra P. 2008. *Hukum kewilayahan Indonesia*. Malang: Bayumedia. (3) Hlm: 28-35, 109-113
- (2) School, Green. 2009. Nasionalisme di Perbatasan Luntur. <http://www.equator-news.com/index.php?mib=berita.detail&id=8327> [9 Februari 2010 jam 16:44](7)
- (3) Praja, Juhaya S. 2005. *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*. Jakarta: Predana Media. (5) Hal: 171
- (4) Rochmadi, Nur Wahyudi. 1993. Imperialisme dan Nasionalisme. Malang: Ikip. (2) Hal: 49-58
- (5) Eko, Dkk. 2009. Warga Perbatasan Masih Setia Pada NKRI. <http://kaltimprov.go.id> [11 Februari 2010 jam 19:25](8)
- (6) Hapsoyo, Sunarto. 1990. *Kamus Bahasa Indonesia Praktis Populer dan Kosakata Baru*. (1) Surabaya: Mekar
- (7) Suriasumantri, Jujun S. 2007. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: PT Pancaranintan Indahjaya. (4) Hal. 59

BIODATA PENULIS

Penulis I:

Nama : Imbalan Zakaria
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM : 208211416577
Fakultas/Jur : Sastra/Sastra Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 22 September 1985
E-mail : bangjekum@gmail.com
Telp/HP : 085755019804
Alamat : Jl. Gading pesantren 26 A, Malang

Kegiatan ilmiah yang pernah diikuti :

1. "Analisis Kebutuhan Masyarakat kecamatan Kaliorang, kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur terhadap kebutuhan berkebun kelapa sawit" PKM-P 2009.
2. "Mengembangkan Pendidikan Muatan Lokal bekerjasama dengan Perusahaan menggunakan Teknik Pamong" KKTU Universitas Negeri Malang 2008.
3. Ketua Pelaksana LKTI pelajar SMA se-Jawa Timur. Universitas Negeri Malang 2009.

Pendidikan

Tahun Lulus	Nama Tempat Pendidikan	Program	Tempat
(Masih Kuliah)	Universitas Negeri Malang (UM)	S1 SASTRA INDONESIA	Malang
2004	SMK N 1 Malang	Pariwisata (3 Tahun)	Malang
2001	SMP N 1 Malang	SMP Umum (3 Tahun)	Malang
1998	SD N Gading Kasri	SD Umum (6 Tahun)	Malang

Malang, 23 Februari 2010

Imbalan Zakaria
NIM. 208211416577

BIODATA PENULIS

Penulis II:

Nama : Emy Zuroidah
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 209211423262
Fakultas/Jurusan : Sastra/Sastra Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 15 Desember 1991
E-mail : she_black_white@yahoo.com
Telp/HP : 085736063440
Alamat : Dsn. Keceling Ds. Kemirisewu RT/RW 001/007
Kec. Pandaan Kab. Pasuruan 67156

Pendidikan

Tahun Lulus	Nama Tempat Pendidikan	Program	Tempat
(Masih Kuliah)	Universitas Negeri Malang (UM)	S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan daerah	Malang
2009	SMA N 1 Pandaan	SMA IPA (3 Tahun)	Pasuruan
2006	SMP N 1 Pandaan	SMP Umum (3 Tahun)	Pasuruan
2003	SD N Kemirisewu 01	SD Umum (6 Tahun)	Pasuruan

Malang, 23 Februari 2010

Emy Zuroidah
NIM. 209211423262

BIODATA PENULIS

Penulis III:

Nama : Bayu Gusti Antri Hariyono
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM : 209211423275
Fakultas/Jurusan : Sastra/Sastra Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 21 Januari 1991
E-mail : bayu_gustian@yahoo.co.id
Telp/HP : 085730024084
Alamat : Ds. Keyongan Kec. Babat-Lamongan

Karya ilmiah yang pernah dibuat:

-

Pendidikan

Tahun Lulus	Nama Tempat Pendidikan	Program	Tempat
(Masih Kuliah)	Universitas Negeri Malang (UM)	S1 Pendidikan bahasa, sastra Indonesia & daerah	Malang
2009	SMAN 1 Kedungpring	SMA IPA (3 TAHUN)	Lamongan
2006	SMPN 1 Babat	SMPN umum (3 tahun)	Lamongan
2003	SDN Keyongan	SDN Umum (6 tahun)	Lamongan

Malang, 23 Februari 2010

Bayu Gusti Antri Hariyono
NIM. 209211423275